PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLISI RESORT KOTA MAMUJU)

Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence (A Case Study in Mamuju Police Station)

Sartini¹, Baso Madiang¹, Zulkifli Makkawaru¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: sartinihendrikdm3@gmail.com

Diterima: 11 September 2021/Disetujui: 21 Desember 2021

ABSTRAK

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah. Dalam memberikan perlindungan dilakukan oleh para penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian pada proses penyidikan memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan hak-hak korban.

Kata Kunci: Hak, Korban, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Legal protection given to every subject is one of the rights given to everyone and these rights are protected by law. The rights inherent in every human being must receive legal protection. Legal protection is also used as a means to protect the rights of legal subjects. Legal protection here is of course legal protection for the community. This theory is an important theory in the focus of this study, especially its target on people who are in a weak position. In providing protection, it is carried out by law enforcers, in this case the police in the investigation process to provide protection to victims and to provide victims' rights.

Keywords: Rights, Victims, Legal Protection

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah Negara hukum dengan berlandaskan Pancasila. Selain itu Indonesia juga sangat menjunjung sangat tinggi perihal martabat dan juga harkat manusia guna menjaga keberlangsungan, kesejahteraan bangsa, termasuk dalam cakupan menjamin perlindungan terhadap hak anak. Hal tersebut dilakukan karena anak merupakan bentuk wujud karunia Tuhan YME, yang nantinya akan terus berkembang menjadi manusia dewasa dan meneruskan misi bangsa serta negara.

Sistem demokrasi adalah salah satu pedoman masyarakat Indonesia, dimana nilai-nilai nasionalisme yang mencakup kebebasan dan kemerdekaan begitu dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut selaras dengan yang disebutkan pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa” yang disebutkan pada alinea pertama. Selama di dalam sistem kenegaraan masih menerapkan pola hidup kolonialisasi berupa

penjajahan, maka sama saja sebuah negara tersebut belum bisa disebut penjajahan. Definisi dari penjajahan sendiri pada dasarnya merupakan wujud dari penguasaan paksa, pengekangan, perampasan, pelanggaran dan pelecehan atas kemerdekaan serta juga hak orang lain.

Dalam hal ini, anak sebagai sosok generasi penerus bangsa mempunyai kendali peran yang sangatlah penting terhadap setiap laju pembangunan nasional yang dimana nantinya wajib mendapatkan sebuah perlindungan dari negara yang ditinggali dan diakuinya. Pernyataan ini sangat sesuai dengan nilai yang terdapat pada UUD 1945, dimana seorang anak sangat berhak dan harus mendapatkan sebuah perlindungan yang berupa kekerasan dalam bentuk fisik dan juga mental.

Semakin pesatnya perkembangan revolusi industri, lambat-laun mempengaruhi pola perkembangan fenomena cara berkehidupan manusia, juga dampak-dampak yang ditimbulkannya, seperti halnya kekerasan seksual terhadap anak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan kejahatan paling serius untuk diamati, karena

semakin berganti hari semakin meresahkan kasusnya, dimana dampaknya juga sangat mengerikan seperti membahayakan dan mengancam kejiwaan si anak. Hal tersebut nantinya akan mengganggu dan merusak tumbuh kembang anak, secara pribadi maupun sosial.

Dalam kurun waktu tahun 2000an ini, banyak sekali kasus yang memberitakan perihal kekerasan seksual dengan korban anak-anak. Dalam definisinya, anak merupakan sosok makhluk hidup yang mempunyai mental, fisik dan jiwa sosial yang masih sangat terbatas akan perkembangannya. Hal tersebut nantinya akan membuat si anak lebih banyak menghadapi berbagai macam resiko dan juga mara bahaya. Dari sini, peran si orang tua anak sangatlah penting, dimana mereka harus sering berperan aktif ketika mendampingi anaknya, dengan memberikan perlindungan yang kuat. Dalam hal ini, perlindungannya bisa berupa pemenuhan kebutuhan seperti papan, pangan dan sandang. Selain itu juga bisa berupa perlindungan terhadap kondisi kejiwaannya, dengan memberikan dampingan dengan melatih psikologis anak terhadap fenomena kesehariannya.

Seluruh elemen masyarakat pasti memiliki prospektif, bahwa setiap anak adalah generasi yang akan melanjutkan cita-cita setiap bangsa, karena sejatinya hanya merekalah yang akan melanjutkan kepemimpinan serta perjuangan bangsa disaat menghadapi berbagai macam rintangan dan juga tantangan baru. Setiap anak memiliki posisi kedudukan yang paling berpotensi strategis guna melanjutkan cita-cita negara, bangsa, keluarga, dan juga masyarakat. Disini lain anak juga menjadi sebuah tumpuan keberlangsungan hidup di masa depan nantinya, maka dari itu setiap anak harus mendapatkan perhatian dari segi perkembangan fisik dan kejiwaannya.

Dalam kurun waktu 2020, Negera Indonesia memiliki catatan perihal kasus kekerasan yang terjadi pada anak semakin tinggi. Terkait catatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo memberikan sikap tegas terhadap kekerasan yang sering terjadi pada anak, terutama kekerasan yang menjerus keranah seksual. Dari beberapa pemberitaan di media, kekerasan seksual terhadap anak adalah jenis kekerasan yang paling tinggi dan paling sering terjadi, berangkat dari persoalan ini, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas yang membahas kaitan penanganan terhadap kasus kekerasan anak, hasil rapat ini dapat dilihat pada laman setneg.go.id, Kamis (9/1).

Berdasarkan dari sumber data online milik Simfoni, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menunjukan tingkatan angka kekerasan anak naik dengan sangat signifikan di tahun 2016. Hal itu pun masih dalam lingkup yang cukup kecil (jumlah laporan kasus). "Adapun beberapa data dari pihak berwenang, seperti kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan di kurun waktu 2015, terdapat total sejumlah 1.975 kasus yang tercatat yang kemudian pada tahun 2016 semakin naik menjadi total 6.820 "ucap dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari tinjauan angka tersebut, terdapat total 70.68 persen anak laki-laki dan 88.24 persen anak perempuan Indonesia yang berada di kisaran umur 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan secara fisik. Sedangkan terdapat 86.65 persen anak laki-laki dan total 96.22 persen anak perempuan di Indonesia telah mengalami kekerasan dalam bentuk non-fisik, dan berpengaruh pada kejiwaan. Adapun dari laporan dari LPSK, di tahun 2019 banyak sekali kasus yang tercatat terkait kekerasan seksual pada anak, yaitu sekitar 350 perkara.

Berdasarkan dari kumpulan data diatas, bisa ditinjau bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak semakin hari semakin meningkat disetiap tahunnya. Maka dari itu, sistem pencegahannya harus dengan metode yang profesional dan adil. KPAI memaparkan bahwa banyak sekali temuan aduan yang masih terkait kekerasan seksual terhadap si anak di kisaran tahun 2010. Tercatat sebanyak 67,8 persen dari 171 kasus aduan yang berkuat pada persoalan kekerasan. Hasil itupun belum seberapa, KPAI menjelaskan bahwa juga pernah terjadi lonjakan kasus kekerasan yang berfokus pada seksual, yaitu sekitar 53 kasus dari 45,7 persen laporan.

Menurut KPAI, jenis kekerasan dan kejahatan terhadap anak masih paling tinggi diantara yang lainnya, contohnya terhitung dari catatan sejak 2007, banyak penyelewengan seksual kepada anak berupa kasus sodomi sering terjadi, total sekitar sebanyak 1.160 kasus terjadi, dimana para pelakunya sering berasal dari para pengajar di pengajian, pengajar privat, pengajar sekolah dan bahkan pegawai pribadi seperti sopir dan pembantu. Berlandaskan pada beberapa kasus ini, Komnas PA meluncurkan Gerakan untuk melawan kejahatan terhadap anak-anak, hal ini diinisiasi berdasarkan peningkatan berupa kekerasan terjadi pada setiap tahunnya. Menurut catatan dari komnas Anak, terdapat 1998 kasus di tahun 2009, kemudian naik menjadi 2335 kasus di tahun 2010 perihal kekerasan terhadap anak, khususnya sodomi pada anak.¹

Berdasarkan data dari KPAI, setiap perilaku tindakan pidana berupa kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual kepada seorang anak atau sodomi anak pertahunnya selalu mengalami peningkatan. Dari kurun waktu 2016 sampai kurun waktu 2019 jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak kurang lebih telah mencapai angka 21 juta, sebanyak 58% kasus kejahatan anak selalu menunjukkan angka yang tinggi dan selalu berdampingan dengan kasus seksualitas.

Mamuju merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana penduduknya terus bertambah, penduduknya terdiri dari berbagai suku yaitu Mandar, Bugis, Toraja, Jawa. Dengan Banyaknya Penduduk serta maka potensi untuk terjadi kejahatan. salah satu kejahatan yang banyak terjadi adalah kejahatan seksual, kasus-kasus kejahatan seksual yang ada di Makassar korbannya dominan anak. Mamuju (11/04) Dilansir berdasarkan catatan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB di Provinsi Sulawesi Barat, kasus kekerasan terhadap anak di pada tahun 2014 sampai kurun waktu 2017 tercatat 445 kasus kekerasan. Adapun catatan lain dari BPS Provinsi Sulawesi Barat memaparkan jumlah tingkatan pernikahan terhadap anak sangatlah tergolong tinggi, dimana terdapat sebanyak 37 persen kasus.

Guna melakukan penanggulangan terhadap setiap permasalahan sosial pada anak harus melibatkan lingkup masyarakat ketika melakukan perlindungan anak agar terhindar dari kegiatan eksploitasi anak dan kekerasan pada anak.

Menurut Anisahaselaku KabidaAnak Korban EksploitasiaKementerian PP-PA menjelaskan "PATBM merupakan sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat Desa/Kelurahan yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak dari kekerasan yang berperan dalam pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayahnya."

ModelaPATBM sudah dilakukan di 136 desa/kelurahan di 68 Kab/Kota dan 34 Provinsi sejak tahun 2016, dan kemudian di replikasi oleh daerah dengan sumber daya daerah mulai tahun 2017 di 116 Desa/kelurahan, 39 Kab/Kota, 18 Provinsi. Kami berharap setelah dilatihnya fasilitator daerah PATBM di dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, semakin massif gerakan PATBM dilakukan di semua desa/kelurahan yang ada di 6 kabupaten/kota di Provinsi Sulbar. Hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang sudah diamanahkan di Pasal 72 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ujar Anisah.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) tujuannya adalah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung nilai. Untuk penelitian normatif digunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu: Data Primer dan Sekunder

Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari sumber langsung melalui wawancara dengan Kasubnit PPA Polresta Mamuju serta Penyidik, sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil telaah dan sejumlah peraturan perundang undangan, keputusan keputusan bahkan laporan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Berbagai upaya perlindungan untuk anak telah dilakukan, hal tersebut demi si anak dapat sebuah kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan porsi usianya guna. Setiap anak harus bisa mendapatkan sebuah hak lindung hukum, terutama dari lembaga pemerintahan. Aturan perihal perlindungan berupa hukum pada setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 (A) menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- Rehabilitasi sosial
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polresta Mamuju, penulis memperoleh data mengenai kejahatan

seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Mamuju dalam kurun waktu tahun 2019-2021, seperti terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Polresta Mamuju Tahun 2019-2021

Tahun	Bentuk Kejahatan	Jumlah
2019	Pemeriksaan/ setubuh, pencabulan	15
2020	Pemeriksaan/ setubuh, pencabulan	20
2021	Pemeriksaan/ setubuh, pencabulan	1 (januari- mei)

Sumber Data: Sat Reskrim Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polresta Mamuju : 2021

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2021 kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi tiap tahunnya. Masalah kejahatan seksual di Kota Mamuju mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tercatat bahwa ditahun 2019-2021 ada 36 (tiga puluh enam) kasus yang dilaporkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mamuju dan menurut keterangan Pak Sulaiman selaku Kepala Unit PPA, bahwa rata-rata kasus kekerasan seksual yang terjadi bentuk kejahatan adalah pemerkosaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit PPA Polresta Mamuju, Sulaiman menjelaskan bahwa: kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah masuk ke tahap dua atau P21 maka akan di serahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan atau *Restorative justice* adalah kasus yang diminta langsung oleh pihak korban untuk mencabut tuntutan, hal ini biasa terjadi jika korban dalam keadaan mengandung, dari pihak kepolisian juga melihat dari aspek kemanfaatannya yaitu anak yang lahir itu harus mendapatkan sosok ayah dengan ketentuan pelaku harus menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Kasus yang sering masuk di unit PPA Polresta Mamuju adalah pemerkosaan. Kasus ini biasanya dilaporkan langsung oleh keluarga korban. Anak yang harus dilindungi karna merupakan aset bangsa, tapi dalam tumbuh kembangnya harus mendapatkan Tindakan yang sangat kejam dari orang yang menurut penulis sangat kejam, Tindakan ini bukan hanya merusak tubuh anak tapi mentalnya yang masih sangat lemah harus mendapatkan masalah sekejam itu.

Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara karena anak merupakan aset bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi, sebagai penerus bangsa.

Dalam UU Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan. Berikut ini akan dijabarkan

mengenai hak-hak korban dan perlindungan terhadap korban sebagai berikut:

1. Hak-hak Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada Sulaiman sebagai Kasubnit PPA Polresta Mamuju ia menyampaikan bahwa; Mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-undang. Contoh misal dalam hal memberikan keterangan tanpa tekanan, anak yang dalam kondisi tidak stabil karena apa yang telah dialaminya dapat mempengaruhi mental anak sehingga anak tidak boleh ditekan, sebagai polisi harus mampu membaca situasi anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang mudah dipahami tanpa menyinggung perasaan anak sebagai korban tersebut.

Menurut Analisa penulis Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021. Penulis melakukan penelitian di Polresta kota Mamuju dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauhmanakah perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta menyebar angket di masyarakat terkait tentang tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Perlindungan Korban

Hampir Sebagian besar kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak, contoh kekerasan seksual yang sering terjadi adalah: kontrol seksual dalam kedok agama yang diskriminatif, diskriminasi terhadap perempuan, praktik tradisi yang mengeksploitasi perempuan dengan berbau citra seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dengan nuansa seksualitas, pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, prostitusi dengan paksa, perdagangan perempuan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan atau intimidasi seksual.

Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi oleh anak tidak hanya dari suatu masalah sepele, tetapi persoalan anak sebagai penerus cita-cita suatu bangsa. Adapun beberapa faktor yang melakukan dukungan terhadap pelayanan kepada korban kekerasan seksual pada anak pernah seperti:

- Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak
- Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan

- Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara Kasubnit PPA Polresta Mamuju Sulaiman menjelaskan bahwa; Segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. Anak sebagai korban mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Selanjutnya lebih jelas lagi pak sulaiman menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

- Identitas korban dirahasiakan
- Dalam proses pemeriksaan korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi, akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya
- Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum
- Tidak terlalu mengespos kemedi

Menurut pandangan penulis bahwa, Pihak kepolisian khususnya Penyidik PPA Polresta Mamuju dalam hal ini, wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban juga tidak dihadirkan ke kantor PPA Polresta Mamuju akan tetapi Pihak PPA Polresta yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pihak PPA mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, ada beberapa yang dapat penulis petik setelah melakukan wawancara bahwasannya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diekspos kemedi sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga. Selanjutnya Sulaiman pun menjelaskan tentang penanganan kasus anak korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut: Dalam penanganan korban kekerasan seksual terkait anak, jika dalam proses penanganan atau penyelidikan kasus dan korban meminta untuk kasusnya diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, maka pihak kepolisian melihat dalam hal asas kemanfaatannya, contoh misalkan korban ini mengandung dan pelaku siap untuk bertanggung jawab maka asas kemanfaatan ini digunakan dalam melihat aspek bahwa anak yang dikandung oleh korban mempunyai hak untuk memiliki seorang ayah yang dapat bertanggung jawab, yang pastinya dalam hal ini pihak korban dan pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan.

Asas kemanfaatan itu sendiri merupakan asas yang mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat yang dapat memberikan bagi pihak satu dengan pihak yang lain. Dari segi manfaat yang didapatkan oleh korban yang terlanjur mengandung bahwa anaknya nanti akan mempunyai ayah yang sah baik secara agama maupun hukum, maka dengan berbagai pertimbangan dari pihak kepolisian dan korban serta keluarga, memberikan beberapa syarat yang harus dipatuhi atau dituruti oleh pihak terlapor maka dengan menggunakan asas kemanfaatan kedua pihak sama-sama merasa suka dan rela atas apa yang telah menjadi keputusan. Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-

benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kehajatan terhadap anak kian hari semakin meningkat, khususnya kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini menjadi kasus yang terbanyak di Indonesia, khususnya di kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tercatat dari tahun 2019 ada 15 kasus, tahun 2020 ada 20 kasus dan pada tahun 2021 dari bulan Januari-Mei ada 1 kasus, jika dilihat dari peningkatan setiap tahunnya maka peneliti mencari apa yang menjadi faktor sehingga kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat.

Tabel 2
Faktor kekerasan seksual terhadap anak

No	Jenis kasus	Tahun	Jumlah
1	Pencabulan/ pemerkosaan	2019	15
2	Pencabulan/ pemerkosaan	2020	20
3	Pencabulan/ pemerkosaan	2021	1
Jumlah		36 kasus	

Sumber: Unit PPA polresta Mamuju tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari Tahun 2019 sampai tahun 2021 ada 36 kasus dengan berbagai faktor penyebabnya.

Ada beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di masyarakat yang membuat merasa takut dan khawatir terhadap pertumbuhan dan mental anak, Ketika orang tua merasa bahwa anak sudah baik, sudah mendapatkan bimbingan yang baik sudah memahami apa yang orang tua nasehati, namun terkadang berbanding terbalik dengan apa yang orang tua harapkan Ketika anak sudah berada diluar rumah. Untuk itulah Ketika anak sudah mulai mengenal dunia luar, melakukan sosialisasi, dan bermain Bersama dengan teman-teman mereka lebih baik didampingi, jangan biarkan anak terlalu bergaul dengan luas, karna lingkungan anak berada sangat mempengaruhi perilakunya.

Lantas siapa yang menjadi pelaku dalam pelecehan seksual terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit PPA Polresta Mamuju Sulaiman menjelaskan

bahwa: Sekiranya banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mamuju, dan laporan yang masuk di unit PPA Polresta Mamuju salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor lingkungan. Pergaulan anak yang terlalu bebas hingga diluar kontrol oleh orang tuanya, lingkungan yang membawa anak terlalu bebas hingga berteman dengan orang-orang yang mereka bahkan baru kenal, anak lupa pulang. Orang yang menjadi teman bergaulpun orang dewasa hingga anak yang belum terlalu paham akan dunia pergaulan luas sangat muda dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021 yakni anak yang menjadi korban adalah anak kelas 2 SMP (sekolah menengah pertama), anak ini sering keluar malam bergaul dengan teman-teman yang bukan hanya teman dari sekolah tapi banyak juga dari luar. Pada saat itu sudah jauh malam, Ketika mereka bubar dari tempat nongkrong anak ini ditawarkan oleh sang pelaku untuk diantar pulang ke rumahnya, karena anak ini merasa percaya pada sang pelaku meskipun baru pertama kali bertemu. Maka anak ini pun diantar pulang tapi ditengah perjalanan sang pelaku berhenti dan memaksa anak ini untuk ikut dengan pelaku hingga pelaku pun melakukan pemerkosaan terhadap anak ini. Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa dalam memilih lingkungan untuk bergaul itu sangat penting. Peran orang tua dalam pengawasannya harus lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, anak masih belum mampu untuk berpikir secara skala Panjang atas apa yang anak lakukan, sehingga anak sangat membutuhkan bimbingan serta arahan dari orang tua atau orang-orang terdekatnya. Lingkungan tempat bergaul memang sangat penting untuk diperhatikan, apalagi untuk anak yang sering keluar rumah tanpa orang tua ketahui pergaulan anaknya bagaimana, anak sangat rentang dengan ajakan-ajakan dari luar dengan iming-iming sesuatu. Anak belum mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Karena anak yang dia tau hanyalah kesenangan yang dia anggap itu semua bagian dari permainan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tenang tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan seksual merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum,

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat dalam keseluruhan, Bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tidak pidana kekerasan seksual, maka diperlukan penegakan hukum

terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak. Dalam hal agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang itu sendiri adalah setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Oleh karena itu selain undang-undang penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakan hukum dalam usaha upaya menanggulangi kekerasan seksual.

Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran didalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma- norma atau kaidah-kaidah hukum baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Salah satu faktor yang menjadi penting dalam penegakan hukum yaitu tersedianya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan cepat. Yang dimaksud dari sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

3. Faktor Teknologi

Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan iptek bagi manusia sangat

tergantung pada nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya.

Harus diakui bahwa di jaman sekarang manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman yang telah ada. Jika tidak, mereka juga akan ketinggalan informasi dan mungkin juga akan dikucilkan atau teralienasi oleh keadaan. Akan tetapi pemakaian teknologi tidak memaksimalkan fungsionalitas dan memakainya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kinerjanya tidak akan efektif. Dengan semakin canggihnya teknologi, hampir semua peran manusia digantikan oleh "robot". Kemajuan teknologi seperti telepon genggam, televisi, radio, dan internet tidak bisa kita hindari dari kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi komunikasi di satu sisi memberikan dampak positif seperti memudahkan manusia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, memudahkan manusia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.

Mudahnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup serta budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Di sisi lain, teknologi juga mempunyai dampak negative. Misalnya teknologi dan komunikasi yang ada banyak digunakan untuk melakukan perilaku menyimpang seperti penipuan, menyontek ketiak ujian nasional, mengunduh situs-situs porno ataupun mengunggah gambar atau video porno yang dapat menyebabkan penurunan bangsa. Dampak negative ini sangat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra sebagai penyidik Tindak Pidana di Polresta Mamuju beliau menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat. Bebasnya akses internet menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dikarenakan penggunaan sosial media yang terlalu bebas bagi masyarakat umum, semua bisa diakses di internet. Seiring berkembangnya jaman sosial media menjadi salah satu kebutuhan penting bagi orang-orang di jaman Sekarang ini. Sosial media seperti facebook, whatsapp, twitter, Instagram serta youtube menjadi konsumsi bebas masyarakat. Misalnya di youtube sering menonton video-video porno yang membuat seseorang ingin melakukannya, karena dorongan diri ingin melakukan seperti yang ditonton maka dia menghalalkan berbagai cara agar nafsunya tersalurkan.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa memang salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor teknologi, penggunaan teknologi ke arah negatif. Penggunaan sosial media yang terlalu bebas, mengakses dan mencari hal-hal yang tidak pantas untuk dikonsumsi apalagi sampai termotivasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Hal ini sangat berdampak pada korban-korban dari pelaku kejahatan, misalkan anak yang menjadi korban, anak yang seharusnya sekolah menuntut ilmu agar dapat menjadi penerus bangsa, namun karena perilaku dari orang-orang yang buruk maka anak menjadi korban dan berdampak pula bagi masa depan anak.

Oleh karena itu masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak,

terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan.

Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa "melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan".

4. Faktor Kerawanan

Mamuju merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat, salah satu daerah yang pada saat ini memang dalam proses pembangunan atau pengembangan. Wilayah yang lumayan luas namun masih banyak daerah-daerah yang belum ada pembangunan atau tanah kosong. Penduduk semakin bertambah dan bercampur dari penduduk asli hingga penduduk yang datang dan menetap di Mamuju, penduduk dengan berbagai suku, misal dari suku Mandar, suku Bugis, suku Jawa dan masih banyak lagi.

Wilayah Mamuju yang masih rawan untuk tempat orang melakukan kejahatan-kejahatan. Misalkan di lokasi yang jauh dari pemukiman warga, disitu sangat rawan orang melakukan kejahatan. Di Mamuju sendiri masih sangat banyak wilayah-wilayah yang tidak ada penduduk atau bisa dikatakan tanah kosong yang. Di tempat-tempat seperti itu banyak terjadi kejahatan misalkan kekerasan seksual seperti pencabulan atau pemerkosaan.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Hendra selaku penyidik Tindak Pidana di Polresta Mamuju bahwa di Mamuju memang salah satu ibu kota provinsi yang termasuk masih banyak wilayah-wilayahnya kosong. Pernah ada kasus Pencabulan yang dilakukan oleh seorang Nelayan, dimana tempatnya itu salah satu kampung Namanya Galung, di tempat itu memang jarang ada orang. Jadi kejadian itu yang menjadi korban adalah anak perempuan. Ketika dimintai keterangan korban menjelaskan bahwa pertama dia diajak jalan dan diiming-imingi akan diberikan sejumlah uang, setelah sampai ditempat tujuan pelaku ini langsung melakukan aksinya dengan memaksakan korban melakukan perbuatan haram atau pencabulan terhadap korban.

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa tempat yang sepi memang sangat rawan terjadinya kejahatan, tempat-tempat seperti itu harus lebih ditingkatkan lagi pengawasan dari pihak yang berwajib dari setiap wilayah. Banyaknya wilayah di Mamuju seperti perbatasan-perbatasan dari desa satu ke desa lain, yang batasnya cukup jauh dan bisa dijadikan oleh orang-orang jahat melakukan aksi kejahatan.

5. Faktor Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil Tindakan perbaikan.

Ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak

di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Fungsi dari pengawasan ialah untuk dapat tetap mengetahui perkembangan.

Pengawasan dalam hal ini adalah bentuk pengawasan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak yang berwajib, pengawasan harus ditingkatkan lagi di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan. Menurut Hendra selaku Penyidik di Polresta Mamuju bahwa memang ada pengawasan dalam bentuk patroli, penjagaan pos dan lain-lain. Akan tetapi wilayah luas dan banyaknya pemukiman warga yang terpisah-pisah dan memiliki jarak yang cukup jauh sehingga tidak mampu untuk dijangkau semua.

Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta

ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pihak Polret Mamuju agar lebih meningkatkan perlindungan serta pengawasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta : Sinar Grafika.
- A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Praktisi.
- Bambang Purnomo. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bambang Wahyo. 2011. Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi). Sinar Grafika
- Bangong Suyono, Masalah Sosial Anak, Cet Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.
- C S T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Eka Hendry. 2003. Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan. Kalimantan. Persadar Press, cet. I Maret'.
- Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.
- H. A Dzajuli. 1997. Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam). Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hurairah, Abu, 2016. Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, cet. I. Bandung: Nuansa.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, cet.1. Pustaka Yustisia.
- Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Dampak dan Penanganannya). Jurnal. Jakarta (52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d%20(1).pdf)
- Jimly Asshiddiqie, 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan (Pemikiran Hukum, Media dan HAM), Konstitusi Press.
- Maidin Gulton. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.
- Rena Yulia. 2010. VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Salmah Novita Ishaq. 2017. Perlindungan Hukum Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Tesis. Makassar
- Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Setya Wahyudi. 2011. Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta publishing.
- Siregar, Bismar, dkk. 1996. Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia - CV. Rajawali.
- Sunardi, 2001. Perlindungan Hukum, Hak-hak dan Kewajiban Anak. Jakarta: Yayasan LBH.
- Syamsul Arifin. 2015. Pengantar Hukum Indonesia. Medan. Medan Area University Press.
- Waluyadi. 2009.Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana.Mandar Maju. Bandung.
- Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama. Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2015. kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka.
- Zulkifli Makkawaru. 2019. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional. Edisi pertama. Suka Bumi. Farha Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban
- <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun.akses> . 21 oktober 2020
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1693/sulbar-siapkan-patbm-untuk-stop-kekerasan-anak> (di akses 24 November 2020)
- <http://news.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas-pa-indonesia-darurat-kejahatan-seksual> (akses 20-oktober-2020)
- <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses tanggal 5 juni 2021)